

# PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN PENDUDUK DI PROVINSI PAPUA

*Ulah Tri Wibowo  
Tukiran*

## Abstract

*There is a disparity in welfare between the people who dwell in mountainous areas and those living in plains, coastal areas which is due to the difference in accessibility. Coastal regions, develop fast and generally have higher economic and social well-being because of the better accessibility they are bestowed with.*

*However, in general, the people of Papua enjoy lower welfare than they are capable of enjoying in relation to the natural resources the province has. The abundant natural resources in the province have not been exploited to the full in endeavor to improve the well being of the population. The division of Papua province into West Papua, Central Papua, and East Papua is expected to accelerate the development process, which should in turn reduce income disparity. None theless, some redress must be found to the problem of uneven distribution of natural resources among the three provinces, to prevent the emergence of regional parochialism which may be the source of income inequality among the three new provinces due to their different respective locations on the coast, plains, and mountainous region.*

## Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan. Terlebih lagi, kesejahteraan merupakan salah satu tujuan nasional bagi bangsa Indonesia. Kesejahteraan merupakan salah satu variabel yang dapat dianggap sebagai penghubung antara kondisi ekonomi dengan morbiditas (Agung dkk, 1993). Hal ini dapat dipahami karena pada umumnya, semakin baik kondisi ekonomi seseorang maka semakin baik pula tingkat pencegahan orang tersebut terhadap morbiditas. Kesejahteraan tidak hanya terdiri dari sebuah indikator tunggal, tetapi terdiri dari beberapa indikator. Atau dengan kata lain, kesejahteraan terdiri dari beberapa komponen atau indikator yang menyusunnya. Beberapa

indikator yang dapat digunakan, antara lain, adalah variabel pendidikan, kesakitan, dan kualitas tempat tinggal. Dengan demikian, dalam menyusun indikator kesejahteraan perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang membentuknya.

Sementara itu, dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya, pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan rakyat juga semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Keadaan kesejahteraan merupakan indeks komposit dari indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Indikator kesehatan diukur dengan menggunakan variabel keluhan kesehatan dan lama sakit. Keluhan kesehatan sebagai indikasi adanya tingkat kesakitan/morbiditas, sedangkan lama sakit sebagai faktor lama gangguan yang dapat berpengaruh pada produktivitasnya. Kemudian, indikator pendidikan diukur dengan variabel melek huruf dan lama sekolah diasumsikan dapat menggambarkan kemampuan sumber daya manusia dalam menemukan dan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Indikator ekonomi didekati dengan variabel pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, sedangkan kualitas tempat tinggal dapat menggambarkan tingkat hunian dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Papua, secara umum, memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Nilai kandungan emas terbesar di dunia dan kandungan tembaga terbesar ketiga di dunia juga dimiliki oleh wilayah ini. Dilihat dari sisi potensi sumber daya alamnya, Papua dapat dikategorikan sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam cukup besar sehingga dapat dikatakan memiliki kondisi ekonomi yang baik pula. Keadaan ekonomi yang baik diikuti dengan pertumbuhan dan distribusi yang merata akan mendukung tercapainya kesejahteraan penduduk yang ada di wilayahnya. Dalam hubungannya dengan sarana dan prasarana perhubungan antarwilayah, seperti halnya daerah pegunungan, daerah dataran, dan daerah pantai serta keadaan sosial-budaya masyarakat yang cukup beragam, sudah tentu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Daerah pantai yang mempunyai aksesibilitas terhadap daerah lain yang lebih baik daripada daerah pegunungan dan dataran akan berpengaruh terhadap

perkembangan kesejahteraan penduduknya. Pemekaran Provinsi Papua menjadi tiga, yaitu Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Timur diharapkan dapat membuka isolasi wilayah serta peningkatan kesejahteraan penduduk. Atau, hal tersebut justru menimbulkan kesenjangan antara ketiga provinsi baru maupun antara kabupaten dan kota karena perbedaan kekayaan sumber daya alam yang ada dengan simpul utama Kabupaten Sorong dan Mimika.

### **Kesejahteraan Penduduk**

Peningkatan kesejahteraan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya, dan manajemen wilayah. Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang memungkinkan suatu daerah memiliki kemampuan ekonomi untuk mendukung kegiatan lainnya, sedangkan sumber daya manusia merupakan faktor yang menentukan bagaimana kesejahteraan tersebut ditingkatkan. Sementara itu, manajemen wilayah lebih mengacu pada sistem pengaturan dan peraturan yang dikembangkan dalam wilayah tersebut. Hal ini bukan hanya yang dikembangkan oleh birokrasi pemerintahan, tetapi juga yang dikembangkan oleh pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah faktor budaya. Keanekaragaman budaya bukan hanya sebagai kekayaan wilayah yang berpotensi di sektor pariwisata, tetapi tidak jarang juga menjadi faktor penghambat maupun pendorong dalam proses pembangunan. Dampak kebiasaan masyarakat dapat bernilai positif bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi juga dapat bernilai negatif dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Kesejahteraan pada dasarnya tidak hanya terdiri dari satu dimensi atau berdimensi tunggal, melainkan multidimensi. Hal ini ditunjukkan dengan pendekatan yang beragam untuk menggambarkan kesejahteraan. Namun demikian, dimensi-dimensi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar berdasarkan lingkungannya, yaitu dimensi fisik, manusia, dan tata sosial budaya.

Dimensi fisik, antara lain, dapat ditunjukkan dengan kondisi geografis maupun ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini terkait dengan aksesibilitas untuk mendapatkan sarana maupun prasarana pendukung kegiatan yang lain. Contoh yang sederhana dalam dimensi ini adalah kemudahan untuk memperoleh sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

maupun pendidikan. Keterisolasian wilayah sangat memungkinkan seseorang tidak memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Keadaan ini akan berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dimensi manusia, antara lain, dapat didekati dengan kondisi pendidikan, pendapatan, maupun kesehatan yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan permasalahan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang baik sangat memungkinkan seseorang mampu meningkatkan pendapatan maupun kesiapan dalam mengatasi keluhan kesehatan. Sementara itu, dimensi sosial budaya lebih menekankan pada perilaku komunitas yang dapat mempengaruhi dalam pencapaian kesejahteraan. Tidak jarang permasalahan kesejahteraan dipengaruhi oleh perilaku dan penilaian masyarakat terhadap hal yang baru. Beberapa kasus kegagalan pembangunan di Papua sering diwarnai dengan perbedaan pandangan antara teknologi dengan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, dalam menilai kesejahteraan masyarakat perlu dicermati kondisi yang ada dalam komunitas tersebut. Berbagai aspek perlu mendapat kajian, dalam hal ini hanya digunakan tiga dimensi, yaitu dimensi fisik, manusia, dan sosial-budaya.

### **Dimensi Fisik**

Pengukuran dimensi fisik daerah menggunakan status desa, dalam hal ini adalah desa tertinggal. Hal ini didasarkan dengan asumsi bahwa desa miskin dapat menggambarkan kesulitan akses yang dialami oleh sebuah desa untuk mencapai berbagai sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, desa tertinggal yang disusun berdasarkan hasil pencacahan potensi desa (podes) sensus maupun potensi desa inti cukup representatif untuk memperoleh gambaran dimensi fisik. Penentuan desa tertinggal menggunakan 25 variabel untuk daerah pedesaan dan 27 variabel untuk daerah perkotaan. Dari variabel-variabel tersebut dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu kelompok potensi desa, perumahan dan lingkungan, serta keadaan penduduk. Perkembangan jumlah desa tertinggal selama 1993-1995 disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan banyaknya desa tertinggal yang ada di Papua pada tahun 1993 menurut kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Jayapura memiliki desa tertinggal terendah. Akan tetapi, pada tahun 1995 meningkat

## Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua

menjadi tertinggi kedua. Selain Kota Jayapura, peningkatan desa tertinggal terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Sementara itu, kabupaten lainnya cenderung mengalami penurunan jumlah desa tertinggalnya. Kabupaten Merauke dan Fak Fak mengalami penurunan yang cukup tinggi. Kabupaten Merauke mengalami penurunan dari 85,9 persen pada tahun 1993 menjadi 29,7 persen pada tahun 1995, sedangkan Kabupaten Fak Fak mengalami penurunan dari 73,4 persen menjadi 27,9 persen.

Tabel 1.  
Banyaknya Desa Tertinggal Dirinci menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Papua Tahun 1993, 1995

Kabupaten/Kota	Total Desa		Desa Tertinggal		Persen Desa Tertinggal	
	1993 <sup>1)</sup>	1995 <sup>2)</sup>	1993 <sup>1)</sup>	1995 <sup>2)</sup>	1993	1995
Merauke	496	509	426	151	85,9	29,7
Jayawijaya	274	274	231	268	84,3	97,8
Jayapura	208	226	132	96	63,5	42,5
Paniai	342	346	285	238	83,3	68,8
Fak Fak	214	215	157	60	73,4	27,9
Sorong	276	277	229	85	82,9	30,7
Manokwari	144	150	99	102	68,8	68,0
Yapen Waropen	110	110	89	63	80,9	57,3
Biak Numfor	153	153	85	74	55,6	48,4
Kota Jayapura <sup>3)</sup>	25	27	5	23	20,0	85,2
Papua	2.242	2.287	1.738	1.160	77,5	50,7

Sumber: Kantor Statistik Provinsi Papua dan BPS Jakarta

Catatan: 1) Berdasarkan Analisis Desa Tertinggal Tahun 1993

2) Berdasarkan Daftar Nama Desa Tertinggal Tahun 1995

3) Dipisahkan dari Kabupaten Jayapura pada Tahun 1993

Fluktuasi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik faktor yang bersifat teknis, seperti metode penentuan desa tertinggal maupun oleh faktor nonteknis, seperti *nonsampling error* ataupun perubahan kebijakan pemerintah. Namun demikian, desa tertinggal tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di Papua memiliki

aksesibilitas yang rendah terhadap sarana dan prasarana yang ada. Termasuk sarana dan prasarana kesejahteraan, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, sarana komunikasi maupun terhadap ketersediaan tenaga kesehatan yang tinggal di desa.

Salah satu kasus tentang kondisi fisik ini adalah memperoleh pendidikan tinggi yang memadai sangat sulit dicapai. Misalnya, dari Kabupaten Jayawijaya untuk dapat mencapai Universitas Cendrawasih hanya dapat menggunakan penerbangan. Demikian juga untuk memperoleh sarana kesehatan yang baik, dari kecamatan ke kota kabupaten tidak sedikit yang harus menempuh perjalanan cukup lama atau menggunakan pesawat terbang. Hambatan-hambatan fisik yang terjadi menyebabkan masyarakat sulit memperoleh akses kesejahteraan yang diperlukan.

### **Dimensi Sumber Daya Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia yang diperkenalkan oleh UNDP pada awal tahun 1990-an yang menggunakan usia harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan banyak digunakan untuk mengukur kualitas manusia. Permasalahan yang dihadapi dalam pengukuran ini adalah ketersediaan informasi pada tingkat kabupaten/kota baru ada mulai tahun 1999.

Berdasarkan indeks pembangunan manusia, pada tahun 1996 Papua mempunyai indeks sebesar 60,2, sedangkan pada tahun 1999 turun menjadi 58,8. Penurunan indeks tidak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di seluruh provinsi di Indonesia. Walaupun terjadi penurunan indeks di Papua, beberapa komponen mengalami peningkatan, kecuali angka harapan hidup. Penurunan indeks pembangunan manusia masih menempatkan Papua pada urutan ke-25 di tingkat nasional (BPS, 2001c).

Berdasarkan indeks pembangunan manusia, Kota Jayapura menempati peringkat pertama. Dalam kurun waktu tiga tahun, Kota Jayapura mengalami peningkatan peringkat di tingkat nasional dari peringkat 59 menjadi peringkat 30. Hal ini didukung dengan proses pembangunan yang terjadi di Kota Jayapura. Pembentukan Kota Jayapura masih relatif muda, tetapi kondisinya sangat mendukung. Terlebih lagi di Kota Jayapura terdapat pusat pemerintahan Provinsi Papua. Sebaliknya, Kabupaten Jayawijaya menempati urutan terakhir, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

*Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua*

Dalam masyarakat Papua terdapat permasalahan internal, yaitu permasalahan mentalitas. Permasalahan tersebut, antara lain, adalah mental yang dihindangi rasa puas akan kebutuhan dasar, pemertingan gengsi dan pengakuan sosial daripada kebutuhan ekonomi, takut mengambil risiko, kurangnya motivasi untuk mencari keuntungan materi, kurang disiplin dalam hal waktu dan tempat, kurang mampu berorganisasi, dan enggan menimbun modal (Wanane, 1997). Memang tidak semua masyarakat memiliki mental seperti itu, tetapi hanya sebagian kecil saja. Namun demikian, dapat mengganggu proses usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan akibat dari rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, terutama di pedesaan.

Tabel 2.  
Indeks Pembangunan Manusia di Papua  
Dirinci menurut Kabupaten/Kota Tahun 1996, 1999

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		Peringkat Indeks			
	1996	1999	1996		1999	
			Nasional	Regional	Nasional	Regional
Merauke	56,8	57,0	281	8	265	8
Jayawijaya	43,9	48,7	291	10	291	9
Jayapura	66,7	65,6	154	3	104	4
Paniai	48,9	43,6	289	9	294	10
Fak Fak	65,6	67,3	178	4	66	2
Sorong	64,6	63,9	201	5	157	5
Manokwari	64,4	60,1	212	6	252	7
Yapen Waropen	60,8	60,8	259	7	241	6
Biak Numfor	69,6	66,0	78	2	92	3
Kota Jayapura	71,0	69,7	59	1	30	1
Papua	60,2	58,8	25		25	

Sumber: BPS, 2001c

Peringkat nasional dihitung berdasarkan urutan kabupaten/kota untuk seluruh Indonesia

Peringkat regional dihitung berdasarkan urutan kabupaten/kota untuk Provinsi Papua

## **Dimensi Sosial Budaya**

Provinsi Papua memiliki potensi budaya yang beragam. Provinsi yang memiliki luas wilayah sekitar seperlima dari luas Indonesia dihuni oleh sekitar 329 suku (Disnaker, 2000). Keunikan lainnya adalah masing-masing kelompok suku, baik kelompok besar maupun kecil, memiliki adat istiadat sendiri (Indonesia, 1994). Masyarakat Papua dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah pantai dan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan.

Kelompok budaya masyarakat pantai dipengaruhi oleh penyebaran agama yang dapat dipisahkan dalam dua kategori. Masyarakat di pantai utara lebih banyak dipengaruhi oleh misionaris Kristen, seperti masyarakat di Kabupaten Sorong, Biak Numfor, Manokwari, dan Jayapura lebih banyak yang menganut Kristen Protestan. Sementara itu, masyarakat yang tinggal di pantai selatan lebih banyak dipengaruhi oleh misionaris Katolik.

Masyarakat pantai dengan budaya pantainya umumnya lebih terbuka dibandingkan dengan masyarakat dengan budaya pegunungan. Masyarakat pantai lebih mudah menerima perubahan yang lebih baik, termasuk dalam menerima informasi. Hal ini dapat dipahami karena sarana transportasi pada awalnya dengan menggunakan kapal dan perahu. Akibatnya, masyarakat pantai mengalami interaksi dengan masyarakat luar terlebih dahulu dibandingkan dengan masyarakat pegunungan.

Masyarakat pegunungan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu masyarakat dataran rendah, lembah, dan lereng pegunungan. Masyarakat pedalaman yang mendiami dataran rendah memiliki adat istiadat yang ketat dan selalu mencurigai pendatang asing. Mata pencaharian masyarakat ini, antara lain, adalah meramu sagu, berkebun, menangkap ikan di sungai, dan berburu. Masyarakat yang mendiami lembah juga memiliki sifat curiga terhadap orang asing, tetapi tidak seketat masyarakat dataran rendah. Mata pencaharian masyarakat yang mendiami lembah pada umumnya adalah bercocok tanam dan memelihara babi (Djopari, 1993). Sifat eksklusif juga terdapat pada masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan. Sifat mencurigai pendatang asing masih cukup tinggi.

Papua memiliki potensi budaya yang cukup besar, seperti potensi seni ukir yang dimiliki oleh Suku Asmat di Kabupaten Merauke. Namun



demikian, keragaman budaya bukan hanya sebagai potensi, tetapi tidak jarang menjadi penghambat pembangunan. Salah satu contoh adalah permasalahan dalam usaha peningkatan status kesehatan. Hambatan yang dialami bukan hanya karena faktor lingkungan dan pelayanan medis, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial budaya masyarakat (Bappeda, 1994). Kasus-kasus kegagalan pembangunan yang disebabkan permasalahan budaya tersebut ditunjukkan oleh berbagai studi. Kegagalan pembangunan tersebut juga sangat didukung oleh karakter budaya masyarakat asli yang relatif eksklusif (Sajogya dkk, 2000).

Kasus kegagalan pembangunan Honai sehat merupakan contoh yang sangat nyata mengenai adanya hambatan budaya. Honai merupakan tempat tinggal Suku Dani di lembah Baliem dengan konstruksi rumah terdiri dari satu pintu dan tanpa jendela. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan syarat-syarat rumah sehat, setidaknya karena kurang adanya ventilasi. Ketika dibangun rumah yang lebih memadai, masyarakat tidak bersedia menempati rumah tersebut dengan alasan bahwa semakin banyak ventilasi, semakin banyak jalan masuk bagi roh-roh jahat. Jika ada yang menempati, mereka menutup seluruh ventilasi dan hanya meninggalkan satu pintu rumah yang terbuka.

Masih di lingkungan masyarakat Dani, pemisahan tempat tinggal juga menyimpan permasalahan kesehatan reproduksi. Pada umumnya, rumah adat terdiri dari honai laki-laki dan honai perempuan serta dapur. Honai laki-laki ditempati oleh kaum laki-laki saja, sedangkan honai perempuan didiami oleh para perempuan dan anak-anak. Ketika hendak melakukan hubungan suami-isteri, suami-istri tersebut melakukannya di luar rumah. Tidak jarang mereka melakukan hubungan suami-istri tersebut di hutan-hutan atau di semak-semak. Hal ini tentunya bukan merupakan hubungan higienis, bahkan cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan reproduksi.

Kasus lainnya adalah kasus pemanenan cabai. Beberapa masyarakat di pedalaman Kabupaten Yapen Waropen melakukan pemanenan cabai dengan cara mencabut batang pohonnya. Hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa jarak yang jauh antara tempat produksi (petani) dengan pemasaran (pasar) tidak memungkinkan cabai tersebut akan tetap segar ketika tiba di pasar. Dengan cara mencabut seluruh batang, dapat diharapkan buah cabai tetap segar sampai di pasar. Dengan demikian,

tanaman cabai yang ditanam dalam waktu cukup lama hanya untuk sekali panen. Tentunya hal ini sangat tidak mendukung ekonomi rumah tangga. Pada kasus pemanenan cabai ini, terdapat pula dimensi fisik, yaitu masih terisolasinya wilayah. Kasus yang sama juga terjadi pada pemanenan buah matoa. Alasan cara pemanenannya yang berbeda. Pada panen buah matoa bukan karena masalah pemasaran, tetapi masalah pemetikannya. Pohon matoa yang cukup tinggi menjadi alasan menggunakan penebangan pohon sebagai cara panen.

### **Keadaan Kesehatan**

Tingkat kesehatan masyarakat dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator derajat kesehatan yang biasanya dinilai dengan melihat angka kesakitan, kematian, kecacatan, dan harapan hidup (Da Costa, 1992). Dalam analisis ini, variabel kesehatan didekati dengan angka kesakitan yang juga merupakan status kesehatan penduduk (BPS, 2001a). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa salah satu tujuan pokok pembangunan kesehatan adalah mengurangi angka kesakitan (Soemantri, 1997).

Menurut Badan Pusat Statistik (2001a), status kesehatan memberikan gambaran kondisi kesehatan penduduk pada waktu tertentu yang dalam Susenas menggunakan jangka waktu satu bulan sebelum pencacahan. Selain itu, status kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas penduduk. Status kesehatan tersebut secara keseluruhan dapat dilihat dengan indikator angka kesakitan yang dinyatakan dalam keluhan kesehatan dan rata-rata lama sakit. Dengan demikian, dalam kelompok kesehatan terdapat dua variabel. Angka kesakitan akan dinyatakan dalam rumusan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang mengalami keluhan sakit selama periode satu bulan sebelum survei terhadap jumlah penduduk (Soemantri, 1997). Sementara itu, rata-rata lama sakit merupakan perbandingan antara jumlah orang-hari penduduk yang menderita sakit dengan jumlah penduduk sakit (BPS, 1999).

Berdasarkan hasil pengolahan Susenas 1994, keluhan kesehatan terendah terjadi di Yapen Waropen (12,5 persen), sedangkan Kabupaten Fak Fak (13,5 persen) menempati urutan kedua. Sementara itu, Kabupaten Paniai (20,9 persen) yang memiliki indeks kesehatan terendah ternyata

## *Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua*

lebih rendah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan Kabupaten Jayawijaya (27,8 persen). Namun demikian, rata-rata lama gangguan kesehatan di Kabupaten Paniai menempati peringkat pertama dengan rata-rata 10 hari setiap bulannya. Sementara itu, Kabupaten Fak Fak memiliki rata-rata lama gangguan terendah, yaitu sekitar 4 hari.

Tabel 3.  
Indeks Kesehatan di Provinsi Papua Tahun 1994, 1997, 1998, dan 2000  
Dirinci menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	1994	1997	1998	2000
Merauke	0,8175	0,8069	0,8166	0,8293
Jayawijaya	0,7793	0,7673	0,7945	0,7331
Jayapura	0,8253	0,7875	0,8256	0,8613
Paniai	0,7293	0,7654	0,7036	0,7120
Fak Fak	0,8626	0,8701	0,8971	0,9091
Sorong	0,8176	0,8312	0,8532	0,8502
Manokwari	0,8192	0,8369	0,8015	0,8302
Yapen Waropen	0,8217	0,7846	0,8179	0,7861
Biak Numfor	0,7985	0,8270	0,8089	0,8339
Kota Jayapura	-- 1)	0,7939	0,7454	0,8109

Sumber: Pengolahan Data Susenas

Catatan: 1) Masih digabung dengan Kabupaten Jayapura

Tingkat keluhan kesehatan di Kabupaten Yapen Waropen pada tahun 1997 menunjukkan peningkatan yang sangat tajam, yaitu sekitar 25,3 persen (Lampiran 1). Pada tahun tersebut, Yapen Waropen menempati peringkat kedua tertinggi. Sementara itu, tempat terendah ditempati oleh Kabupaten Fak Fak (12,5 persen). Kabupaten Jayawijaya (33,3 persen) tetap memiliki tingkat keluhan tertinggi. Sementara itu, lamanya keluhan kesehatan selama tahun 1997 terlama terjadi di Kota Jayapura, yaitu sekitar 7 hari, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya, yaitu sekitar 4 hari.

Pada awal krisis ekonomi di tahun 1998, tingkat keluhan tertinggi terjadi di Kabupaten Paniai (34,3 persen) dengan rata-rata lama gangguan sekitar 7 hari. Sementara itu, di Kabupaten Fak Fak (4,9 persen) tingkat keluhan terendah memiliki rata-rata lama gangguan 5 hari. Rata-rata lama

gangguan tertinggi terjadi di Kota Jayapura (8 hari) dan terendah di Kabupaten Manokwari dan Jayawijaya masing-masing selama 4 hari.

Pada tahun 2000, tingkat keluhan tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya (36,7 persen) dengan rata-rata lama keluhan 5 hari. Kabupaten Paniai (33,1 persen) menempati urutan kedua dengan rata-rata lama gangguan 7 hari. Tingkat keluhan terendah terjadi di Kabupaten Fak Fak (4,7 persen) dengan rata-rata lama gangguan 4 hari. Sementara itu, rata-rata lama gangguan tertinggi terjadi di Kota Jayapura (9 hari) dengan tingkat keluhan sebesar 8,0 persen.

Indeks kesehatan merupakan gabungan antara variabel banyaknya orang yang memiliki keluhan kesehatan dan lamanya keluhan gangguan kesehatan menunjukkan keadaan kesehatan masyarakat. Berdasarkan indeks kesehatan, Kabupaten Fak Fak memiliki tingkat kesehatan yang terbaik, sementara yang terendah tingkat kesehatannya adalah Kabupaten Paniai.

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Fak Fak cenderung lebih baik karena tingkat keluhan sakit yang relatif rendah dibandingkan dengan keluhan di masyarakat di kabupaten lainnya. Selain itu, lamanya gangguan kesehatan masyarakat di Kabupaten Fak Fak juga lebih kecil dibandingkan dengan lamanya gangguan kesehatan di kabupaten lainnya. Pada tahun 1994, penghitungan Kota Jayapura masih digabung dengan Kabupaten Jayapura dan menempati peringkat kedua. Pada peringkat kedua ini terjadi pergeseran-pergeseran. Tahun 1997 ditempati oleh Kabupaten Manokwari, tahun 1998 oleh Kabupaten Sorong, dan tahun 2000 kembali ditempati oleh Kabupaten Jayapura.

### **Keadaan Pendidikan**

Keadaan pendidikan sering kali diukur dengan menggunakan variabel melek huruf dan rata-rata lama sekolah (BPS, 2001c). Berdasarkan tingkat melek huruf, tahun 1994 Kabupaten Biak Numfor (87,7 persen) menempati urutan pertama, sedangkan tingkat melek huruf terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya (38,7 persen). Pada tahun 1997, 1998, dan 2000, tingkat melek huruf tertinggi terjadi di Kota Jayapura yang masing-masing sebesar 90,4 persen, 92,9 persen, dan 84,7 persen (lihat lampiran 2). Sementara itu, pada periode yang sama, tingkat melek huruf terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya. Pada tahun 1997, tingkat melek huruf

### *Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua*

mencapai 44,1 persen, sedangkan pada tahun 1998 dan 2000 masing-masing sebesar 38,7 persen dan 33,2 persen. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jayapura (8 tahun) pada tahun 1994 merupakan yang tertinggi. Pada tahun 1997, 1998, dan 2000, rata-rata lama sekolah terjadi di Kota Jayapura yang masing-masing sebesar 9 tahun. Rata-rata lama sekolah dari tahun ke tahun yang terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya yang berkisar antara 2 hingga 5 tahun.

Banyaknya melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah digambarkan dengan satu indikator, yaitu indeks pendidikan. Indeks pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dari sisi dimensi manusia. Berdasarkan indeks pendidikan yang dihitung dengan menggunakan dua variabel tersebut, maka Kabupaten Jayapura menempati peringkat pertama pada tahun 1994. Akan tetapi, pada tahun 1997 posisi Kabupaten Jayapura digeser dengan Kota Jayapura. Hal ini dapat dipahami bahwa di Kota Jayapura ini dapat dikatakan sebagai pusat pendidikan di Papua. Selain itu, Kota Jayapura juga merupakan pusat pemerintahan yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi.

Tabel 4.  
Indeks Pendidikan di Provinsi Papua Tahun 1994, 1997, 1998, dan 2000  
Dirinci menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	1994	1997	1998	2000
Merauke	0,6095	0,6039	0,6126	0,5154
Jayawijaya	0,3682	0,4045	0,3049	0,2678
Jayapura	0,7469	0,6820	0,7010	0,5980
Paniai	0,4732	0,4848	0,4126	0,3769
Fak Fak	0,6900	0,7078	0,7236	0,6810
Sorong	0,6998	0,7258	0,7003	0,6468
Manokwari	0,6113	0,6644	0,5847	0,4953
Yapen Waropen	0,6662	0,6560	0,6467	0,5208
Biak Numfor	0,7324	0,7617	0,7279	0,6599
Kota Jayapura	-- <sup>1)</sup>	0,7982	0,8175	0,7550

Sumber: Pengolahan Data Susenas

Catatan: 1) Masih digabung dengan Kabupaten Jayapura

Sistem pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi terbaik di Papua terdapat di Kota Jayapura, baik untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Selain Universitas Cendrawasih, di Kota Jayapura terdapat STIE Ottow-Geissler dan STIE Yapis yang memiliki pendidikan ilmu ekonomi yang baik. Demikian pula dengan pendidikan ilmu politik dengan Stisipol Silas Papare, pendidikan teknik dengan Sekolah Tinggi Teknik Jayapura, dan sejumlah Sekolah Tinggi Teologia. Beberapa akademi yang ada di Kota Jayapura, antara lain, adalah akademi kesehatan, akademi sekretaris dan manajemen, akademi pariwisata, serta akademi keuangan dan perbankan.

Indeks pendidikan terendah terdapat di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini dapat dipahami karena daerah tersebut masih terisolasi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Jayawijaya hanya dapat ditempuh melalui jalur udara, bahkan untuk perjalanan dari kota kabupaten menuju ke kota kecamatan, atau dari kota kecamatan menuju ke desa. Hal tersebut sangat menyulitkan program pemberantasan buta huruf maupun peningkatan pendidikan. Kondisi masyarakat Kabupaten Paniai yang menempati peringkat keterbelakangan kedua juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Di Kabupaten Paniai masih cukup banyak daerah yang hanya dapat ditempuh melalui jalur udara. Namun demikian, berbeda dengan kondisi Kabupaten Jayawijaya, di Kabupaten Paniai sudah terdapat daerah yang dapat ditempuh melalui jalur laut. Beberapa kapal motor yang menuju Jayapura atau ke luar Irian Jaya telah singgah di kabupaten ini.

### **Keadaan Ekonomi**

Keadaan ekonomi didekati dengan dua variabel, yaitu tingkat pengeluaran per kapita sebagai proksi pendapatan per kapita dan kualitas rumah/tempat tinggal. Pola pengeluaran rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk (BPS, 2001a). Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu determinan kesejahteraan yang penting dalam suatu periode adalah peningkatan pendapatan rumah tangga. Pendapatan yang meningkat sudah seharusnya meningkatkan daya beli rumah tangga terhadap kebutuhan barang dan jasa (BPS, 1999a).

## *Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua*

Sementara itu, menurut Anwar (1997), tinggi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dapat dilihat dari kualitas bahan bangunan yang digunakan untuk rumah dan segala utilitasnya. Utilitas tersebut, antara lain, berupa listrik, gas, dan air. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik cenderung memiliki perumahan yang lebih baik pula dibandingkan dengan masyarakat yang miskin. Dengan demikian, kualitas rumah dapat digunakan pula untuk melihat tingkat perekonomian masyarakat. Untuk perumahan ini dilakukan dengan pendekatan pada indeks perumahan (BPS, 1999).

Rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi tahun 1994 terjadi di Kabupaten Biak Numfor, yaitu sebesar Rp 81.000,00 (lihat lampiran 3). Setelah dipisahkan dari Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura memiliki pengeluaran tertinggi, baik untuk tahun 1997 (Rp 119.000,00); 1998 (Rp 182.000,00); maupun tahun 2000 (Rp 215.000,00). Rata-rata pengeluaran terendah adalah di Kabupaten Jayawijaya, baik untuk tahun 1994 (Rp 25.000,00); 1997 (Rp 34.000,00); 1998 (Rp 45.000,00); maupun tahun 2000 (Rp 70.000,00).

Kabupaten Fak Fak yang memberikan sumbangan terbesar dalam PDRB Provinsi Papua, yaitu lebih dari 50 persen, ternyata pada tahun 1994 memiliki peringkat pengeluaran terendah ketiga setelah Kabupaten Jayawijaya dan Paniai. Meskipun sejak tahun 1998, Kabupaten Fak- Fak mengalami perbaikan. Hal ini dimungkinkan dengan dimulainya pemberian kompensasi terhadap masyarakat sekitar penambangan PT. Freeport.

Sementara itu, kualitas rumah tertinggi pada tahun 1994 terdapat di Kabupaten Jayapura (0,47), sedangkan tahun 1997, 1998, dan 2000 di Kota Jayapura yang masing-masing 0,69; 0,61; dan 0,62 (lihat lampiran 3). Kondisi ini dapat dipahami karena Kota Jayapura yang merupakan pusat pemerintahan daerah provinsi memiliki cukup banyak akses terhadap pembangunan fasilitas tempat tinggal. Sementara itu, kualitas terendah terdapat di Kabupaten Jayawijaya, baik untuk tahun 1994 (0,18), 1997 (0,30), 1998 (0,19), maupun untuk tahun 2000 (0,18). Hal ini dapat disebabkan letak Kabupaten Jayawijaya yang masih sangat terisolasi, sehingga mengalami kesulitan untuk mengakses pembangunan fasilitas tempat tinggal. Keadaan ini didukung sulitnya transportasi untuk mencapai kabupaten ini. Bahan-bahan bangunan sangat mahal sehingga masyarakat

lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di daerah sekitar tanpa harus mendatangkan dari luar kabupaten. Selain itu, kuatnya budaya yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya menyebabkan pembangunan perumahan yang lebih memadai relatif sulit untuk dilakukan.

Indeks ekonomi menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya merupakan kabupaten yang menempati peringkat terendah, baik untuk tahun 1994 (0,0887), 1997 (0,1751), 1998 (0,1495), maupun tahun 2000 (0,2071). Hal ini dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah Kabupaten Jayawijaya yang masih terisolasi maupun oleh kondisi budaya yang masih tertutup. Perubahan-perubahan yang mengarah pada perbaikan masih sering menghadapi kendala budaya. Sementara itu, Kabupaten Jayapura menempati peringkat pertama untuk tahun 1994 (0,3812) dan disusul oleh Kabupaten Biak Numfor (0,3463). Kabupaten Biak Numfor memiliki kondisi yang relatif baik sehingga mampu menempati peringkat kedua pada tahun 1994. Hal ini dimungkinkan dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan.

Tabel 5.  
Indeks Ekonomi Tahun 1994, 1997, 1998, dan 2000  
Dirinci menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	1994	1997	1998	2000
Merauke	0,1874	0,2757	0,2875	0,3902
Jayawijaya	0,0887	0,1751	0,1495	0,2071
Jayapura	0,3812	0,3333	0,3582	0,3665
Paniai	0,1478	0,2396	0,1939	0,2866
Fak Fak	0,1905	0,3194	0,3281	0,4355
Sorong	0,2783	0,4459	0,3830	0,5866
Manokwari	0,2370	0,3622	0,2937	0,4348
Yapen Waropen	0,2464	0,3367	0,3757	0,4725
Biak Numfor	0,3463	0,5001	0,4570	0,5063
Kota Jayapura	-- 1)	0,5946	0,7187	0,8101

Sumber: Pengolahan Data Susenas

Catatan: 1) Masih digabung dengan Kabupaten Jayapura



## *Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua*

Sebelum krisis terjadi, terdapat beberapa perusahaan yang berperan di Kabupaten Biak Numfor. Perusahaan itu, antara lain, adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengalangan ikan. Hal ini cukup berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat kabupaten tersebut, tetapi perusahaan tersebut tidak dapat bertahan dengan terjadinya krisis ekonomi sehingga terjadi pergeseran peringkat. Sejak tahun 1997, Kota Jayapura merupakan daerah tingkat II yang memiliki indeks ekonomi yang tertinggi (0,5946). Demikian pula pada tahun 1998 dan 2000 atau setelah krisis ekonomi terjadi, Kota Jayapura menempati urutan pertama yang masing-masing dengan indeks ekonomi sebesar 0,7187 dan 0,8101.

### **Perkembangan Kesejahteraan**

Ketiga indikator yang dijadikan dalam satu indeks komposit menunjukkan bahwa pada tahun 1994 Kabupaten Jayapura (0,6618) menempati urutan pertama. Tingkat kesejahteraan terendah pada tahun 1994 terjadi di Kabupaten Jayawijaya (0,5196). Setelah Kota Jayapura dipisahkan dari Kabupaten Jayapura, tingkat kesejahteraan di Kabupaten Biak Numfor (0,6763) tampak lebih baik dibandingkan dengan kota dan kabupaten lainnya. Akan tetapi, kondisi tersebut hanya terjadi pada tahun 1997. Pada tahun yang sama, Kabupaten Jayawijaya (0,5151) masih tetap menempati urutan terakhir.

Pada tahun 1998 dan 2000, pada saat krisis terjadi, Kota Jayapura menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lainnya, bahkan terdapat peningkatan kesejahteraan dari tahun 1998 (0,7238) ke tahun 2000 (0,7519). Hal ini mengindikasikan bahwa selama krisis ekonomi terjadi, tingkat kesejahteraan di Kota Jayapura tidak terpengaruh.

Kota Jayapura yang lebih terbuka dibandingkan dengan daerah lainnya sangat menguntungkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Segala sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pemerintahan daerah provinsi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat di Kota Jayapura. Pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi, serta fasilitas kegiatan ekonomi dapat dengan mudah diakses di Kota Jayapura. Kondisi ini sangat berbeda dengan beberapa kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Paniai, Jayawijaya, maupun Yapen Waropen.

Tabel 6.  
 Indeks Kesejahteraan di Provinsi Papua Tahun 1994, 1997, 1998, dan 2000  
 Dirinci menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	1994	1997	1998	2000
Merauke	0,6125	0,6141	0,6354	0,6529
Jayawijaya	0,5196	0,5151	0,5195	0,5104
Jayapura	0,6618	0,6157	0,6600	0,6695
Paniai	0,5385	0,5429	0,5201	0,5454
Fak Fak	0,6359	0,6408	0,6763	0,7080
Sorong	0,6266	0,6399	0,6626	0,7001
Manokwari	0,6135	0,6214	0,6109	0,6376
Yapen Waropen	0,6339	0,6240	0,6555	0,6581
Biak Numfor	0,6609	0,6763	0,6802	0,7048
Kota Jayapura	-- 1)	0,6641	0,7238	0,7519

Sumber: Pengolahan Data Susenas

Catatan: 1) Masih digabung dengan Kabupaten Jayapura

Kabupaten Jayawijaya tidak mengalami perubahan urutan kesejahteraan untuk tahun 1998 (0,5195) maupun tahun 2000 (0,5104), bahkan menunjukkan adanya penurunan kesejahteraan selama krisis ekonomi terjadi. Hal ini didukung dengan kondisi geografis yang masih sangat terisolasi sehingga segala kebutuhan pokok masih harus didistribusikan melalui jalur udara. Demikian juga dengan akses terhadap berbagai fasilitas, masih cukup sulit karena keterisolasian daerah. Selain itu, kondisi geografis di Kabupaten Jayawijaya masih kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan. Faktor budaya yang tertutup dan sulit untuk menerima perubahan masih sangat menghambat peningkatan kesejahteraan. Faktor kecurigaan terhadap berbagai pihak, termasuk usaha peningkatan kesejahteraan, masih cukup kuat pada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

### **Pemekaran Wilayah dan Kesejahteraan**

Pembangunan yang dilakukan pada tingkat nasional maupun regional pada dasarnya bukan hanya untuk peningkatan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, pemekaran wilayah terjadi sebagai salah satu usaha untuk menggali potensi wilayah

## *Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua*

dalam pembangunan. Namun, setiap kebijakan akan memiliki dampak negatif dan positif. Demikian juga dengan pemekaran wilayah yang membagi Papua menjadi tiga provinsi, hal itu akan memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat.

Terdapat beberapa dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pemekaran wilayah. *Pertama*, semakin fokusnya usaha pembangunan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan indikator kesejahteraan di tiap wilayah. Daerah yang satu dengan daerah yang lain akan memiliki kecenderungan yang berbeda kesejahteraannya. Penghitungan indeks kesehatan tahun 1994 menunjukkan bahwa Kabupaten Fak Fak memiliki indeks yang lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Merauke, bahkan dengan Kabupaten Jayapura. Akan tetapi, indeks pendidikan pada tahun yang sama menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura cenderung lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Fak Fak walaupun Kabupaten Fak Fak masih lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Merauke. Demikian pula dengan indeks ekonominya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dengan pemekaran wilayah akan lebih memudahkan fokus pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

*Kedua*, pemekaran wilayah akan memerlukan peningkatan kreativitas dan inovasi. Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan yang ada di Kota Jayapura. Pengembangan sektor unggulan akan menjadi tantangan baru sebagai sektor yang akan menarik sektor ekonomi lainnya. Hal ini didasari dengan perbedaan potensi wilayah yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Kota Jayapura, walaupun hanya memiliki sumbangan yang tidak terlalu besar terhadap perekonomian secara keseluruhan, menjadi pusat pendidikan selain sentral perekonomian. Demikian pula dengan pengembangan transportasi laut yang juga menjadi salah satu keunggulan di Kota Jayapura. Walaupun Kota Jayapura tidak terlalu besar memberikan sumbangan terhadap PDRB, kota tersebut cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Sebaliknya, Kabupaten Fak Fak yang memberikan sumbangan terbesar pada PDRB, tingkat kesejahteraannya bukan yang terbaik.

*Ketiga*, pemekaran wilayah akan semakin melokalisasi budaya masyarakat. Hal ini sangat penting, karena dengan melokalisasi budaya

masyarakat akan mengurangi hambatan dalam usaha peningkatan kesejahteraan. Setidaknya akan memudahkan penyesuaian dengan kondisi sosio-antropologis masyarakat. Hal ini juga didasarkan dengan banyaknya suku yang ada maupun dengan sikap ketertutupan pada sebagian masyarakat.

*Keempat*, pemekaran wilayah akan menuntut pemenuhan sumber daya manusia yang memadai. Dengan demikian akan terjadi proses pemacuan tingkat kualitas sumber daya manusia yang ada. Kota Jayapura sebagai pemerintahan provinsi cenderung memiliki tingkat kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dibandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Indeks pembangunan sumber daya manusia Kota Jayapura, bahkan mampu menempati peringkat ke-30 di tingkat nasional pada tahun 1999.

Namun sebaliknya, pemekaran wilayah akan menimbulkan dampak negatif, yaitu terjadi pemusatan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini tampak pada sumber daya minyak yang hanya ada di Kabupaten Sorong yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat. Sementara itu, pertambangan nonmigas, khususnya tembaga terdapat di Mimika yang termasuk dalam wilayah Provinsi Papua Tengah. Sumber daya alam yang dimiliki akan menimbulkan ketimpangan antarwilayah dan anggapan ini akan memunculkan pemecahbelahan masyarakat di Papua.

Anggapan yang berkembang dalam masyarakat tersebut akan dapat dikurangi dengan argumen bahwa pemekaran wilayah justru akan dapat meningkatkan kinerja dalam eksplorasi sumber daya alam. Hal ini merupakan tantangan baru bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi dan kreativitas pendayagunaan sumber daya alam akan menjadi kunci dalam perkembangan di masa pascapemekaran wilayah.

## **Penutup**

Tingkat kesejahteraan yang ada di Papua memiliki perbedaan antarwilayah seperti halnya wilayah pegunungan, dataran, dan pantai. Sementara itu, usaha peningkatan kesejahteraan menghadapi berbagai kendala, baik dari kondisi fisik maupun sosial budaya masyarakat yang ada pada ketiga wilayah tersebut. Pembangunan wilayah yang pada

## *Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua*

dasarnya berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat masih sangat perlu mempertimbangkan kondisi sosio-antropologis masyarakat daerah pegunungan, pedalaman, dan pantai yang sangat berbeda karakteristiknya.

Pemekaran wilayah propinsi akan berpengaruh secara nyata kepada kondisi kesejahteraan. Wilayah dataran dan pegunungan akan memiliki aksesibilitas yang lebih baik daripada ketika Papua masih dalam satu provinsi. Dengan dikembangkan menjadi tiga provinsi baru, pembangunan akan terbagi ke dalam tiga simpul utama yaitu Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Timur. Akan tetapi sisi negatif juga perlu dipikirkan yakni peranan PT. Freeport akan semakin terfokus untuk Provinsi Papua Tengah, demikian pula untuk minyak bumi yang berada di Provinsi Papua Barat. Sementara itu, Provinsi Papua Timur tidak memiliki sumber daya alam minyak, emas, tembaga, dan batu bara yang memadai. Hal ini akan menyebabkan konsentrasi ekonomi di masing-masing wilayah dan akan muncul wilayah pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi untuk wilayah tertentu, sedangkan wilayah yang lain tidak demikian halnya. Tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rebutan pemanfaatan sumber daya alam antarprovinsi baru. Apabila tidak ditangani secara serius, dikhawatirkan akan muncul "ego wilayah" yang cenderung mementingkan wilayahnya sendiri. Perlu dipikirkan bagaimana pengembangan Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Timur menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak serakah sesaat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Batas wilayah provinsi yang baru tidak selalu tepat dengan batas kandungan sumber daya alam yang ada dan hak ulayat/warga. Saling memberi dan menerima manfaat sumber daya yang ada memungkinkan untuk ketiga provinsi tersebut maju bersama.

### **Referensi**

- Agung, I. N. dan Akhir Matua Harahap. 1993. "Perubahan Demografi di Indonesia", dalam Aris Ananta (ed.) *Ciri Demografis Kualitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Demografi dan Lembaga Penerbitan FEUI, hlm. 21-47.
- Anwar, J. 1997. "Data dan Indikator Perumahan: antara Kebutuhan dan Penyediaan", dalam W Imawan dan A. Anhaf (eds.) *Pedoman Analisis Data Susenas Bidang Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Biro Pusat Statistik, hlm. 101-129.

- Badan Pusat Statistik. 1999. *Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Rakyat: Pemanfaatan Data Survei Sosial Ekonomi dan Data Sosial Kependudukan Lainnya. Panduan Pelatihan*. Jakarta: Kerja sama dengan UNFPA.
- . 1999a. *Kecenderungan Kesejahteraan Rakyat di Masa Krisis Moneter Berdasarkan Hasil Survei Seratus Desa 1997 dan 1998*. Jakarta: Kerja sama dengan UNICEF.
- . 2001a. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2000*. Jakarta.
- . 2001b. *Statistik Indonesia 2000*. Jakarta.
- . 2001c. *Indonesia Human Development Report 2001: Towards a new Consensus Democracy and Human Development in Indonesia*. Jakarta: Kerja sama dengan Bappenas dan UNDP.
- Bappeda. 1994. *Analisis Desa Miskin 1993*. Jayapura: Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. I Provinsi Irian Jaya dengan Kantor Statistik Provinsi Irian Jaya.
- Da Costa, Sriati. 1992. "Indikator Kesehatan, Gizi, dan Keluarga Berencana", dalam *Kumpulan Bahan-bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Biro Pusat Statistik, hlm. 103-135.
- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). 2000. *Profil Ketenagakerjaan dan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Irian Jaya tahun 1999/2000*. Jayapura: Kerjasama dengan Bappeda, BPS, Universitas Cendrawasih, dan Depnaker.
- Djopari, John R.G. 1993. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Republik Indonesia. 1994. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/95-1998/99 Buku VI*. Jakarta.
- Sajogyo dan M. Sarman. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi Dari Kawasan Timur Indonesia*. Jakarta: Puspa Swara.
- Soemantri, Soeharsono. 1997. "Analisis Data Kor Susenas untuk Sektor Kesehatan", dalam W. Imawan dan A. Ahnaf (eds.) *Pedoman Analisis Data Susenas Bidang Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Biro Pusat Statistik, hlm. 37-55.
- Wanane, Teddy K. E. 1997. "Upaya Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pendekatan Sosio-antropologis", *Seminar Sehari tentang Pengentasan Masyarakat Irian Jaya dari Kemiskinan*, diselenggarakan oleh IPADI Cabang Irian Jaya dan Kanwil BKKBN Provinsi Irian Jaya, 17 September.

*Perkembangan Kesejahteraan Penduduk di Provinsi Papua*

**Lampiran 1. Indikator Kesehatan**

Kabupaten/Kota	1994		1997		1998		2000	
	Keluhan	Lama	Keluhan	Lama	Keluhan	Lama	Keluhan	Lama
Merauke	20,66	4,75	23,25	4,61	18,86	5,35	17,60	4,96
Jayawijaya	27,76	4,91	33,31	3,97	27,47	4,09	36,69	5,01
Jayapura	17,11	5,35	21,20	6,39	15,04	5,95	12,04	4,71
Paniai	20,94	9,96	24,30	6,78	34,33	7,49	33,97	7,09
Fak Fak	13,53	4,18	12,48	4,05	4,86	4,72	4,69	4,05
Sorong	16,04	6,13	17,15	4,98	13,34	4,81	14,89	4,52
Manokwari	20,06	4,83	17,21	4,62	26,29	4,02	19,53	4,33
Yapen Waropen	12,51	6,94	25,34	5,32	20,13	4,89	28,26	4,35
Biak Numfor	19,25	6,32	13,57	6,31	15,59	6,79	8,96	7,27
Kota Jayapura	-	-	17,48	7,12	24,33	7,98	8,01	8,94

Sumber: Hasil Pengolahan Susenas

**Lampiran 2. Indikator Pendidikan**

Kabupaten/Kota	1994		1997		1998		2000	
	Melek Huruf	Lama Sekolah	Melek Huruf	Lama Sekolah	Melek Huruf	Lama Sekolah	Melek Huruf	Lama Sekolah
Merauke	73,28	5,44	71,31	5,78	76,07	4,74	63,92	4,02
Jayawijaya	38,66	4,97	44,07	4,98	38,66	2,12	33,15	2,11
Jayapura	86,15	7,76	79,63	6,80	83,61	6,46	71,08	5,59
Paniai	52,08	5,67	53,21	5,85	50,53	3,41	45,24	3,39
Fak Fak	83,47	6,01	83,84	6,70	87,81	6,22	81,53	6,19
Sorong	81,45	7,06	84,09	7,43	84,10	6,28	75,37	6,49
Manokwari	71,49	6,07	77,30	6,71	71,63	4,82	59,46	4,45
Yapen Waropen	78,00	6,58	76,53	6,56	79,06	5,38	63,82	4,29
Biak Numfor	87,68	6,65	89,56	7,41	86,62	6,77	78,65	6,10
Kota Jayapura	-	-	90,40	8,80	92,86	8,93	84,71	8,56

Sumber: Hasil Pengolahan Susenas.

**Lampiran 3. Indikator Ekonomi**

Kabupaten/Kota	1994		1997		1998		2000	
	Kualitas Rumah	Pengeluaran	Kualitas Rumah	Pengeluaran	Kualitas Rumah	Pengeluaran	Kualitas Rumah	Pengeluaran
Merauke	0,28	43,44	0,34	64,24	0,31	75,13	0,28	120,75
Jayawijaya	0,18	24,78	0,30	34,00	0,19	45,47	0,18	69,97
Jayapura	0,47	80,79	0,46	64,93	0,40	84,08	0,32	103,88
Paniai	0,23	36,34	0,36	47,26	0,25	51,07	0,24	88,31
Fak Fak	0,34	33,45	0,47	55,96	0,42	69,75	0,40	114,12
Sorong	0,42	51,53	0,58	83,51	0,45	85,15	0,48	156,14
Manokwari	0,33	52,76	0,50	67,63	0,35	70,54	0,35	124,19
Yapen Waropen	0,33	55,26	0,41	75,79	0,37	96,67	0,31	146,57
Biak Numfor	0,39	81,53	0,56	108,56	0,45	112,46	0,39	144,12
Kota Jayapura	-	-	0,69	118,96	0,61	182,21	0,62	215,13

Sumber: Hasil Pengolahan Susenas.

Catatan: Pengeluaran dinyatakan dalam ribuan rupiah